

PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM REPELITA VII

Oleh:
Ginandjar Kartasasmita
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas

Disampaikan pada Rapim ABRI 1997
Jakarta, 3 April 1997

I. Pendahuluan

Dalam Rapim ABRI tahun yang lalu saya telah berbicara mengenai gambaran masa depan yang ingin kita wujudkan pada akhir PJP II dengan berbagai tantangannya. Mengenai Repelita VII juga telah saya kemukakan berbagai pikiran yang ada pada kita dalam konteks pembahasan itu.

Oleh karena itu, saya tidak akan mengulangi pembahasan mengenai pembangunan dalam PJP II, tetapi khusus menyoroti sedikit lebih rinci mengenai Repelita VII sesuai permintaan penyelenggara Rapim ini.

Memang, penyusunan Repelita VII akan berpedoman kepada GBHN 1998 yang setelah pemilihan umum nanti baru akan dirumuskan oleh para wakil rakyat. Namun rumusan pokok-pokok pikiran dalam PJP II yang telah kita miliki sewaktu menyusun Repelita VI, kiranya dapat menjadi bahan acuan dalam melihat gambaran masyarakat Indonesia pada akhir Repelita VII.

Kata kunci yang terpatrit dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan telah kita tetapkan menjadi sasaran jangka panjang adalah **kemajuan, kemandirian, keadilan**, dan peningkatan **kesejahteraan**. Dalam Repelita VII, sasaran itu ingin dicapai dengan meletakkan titik berat pembangunan pada bidang ekonomi seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Titik berat pembangunan ini memang berbeda dengan tahapan pembangunan terdahulu yang hanya meletakkannya pada bidang ekonomi. Namun, pergeseran paradigma itu sebenarnya menunjukkan perkembangan kemajuan pembangunan kita.

II. Tantangan-tantangan Pembangunan

Dengan pokok-pokok pikiran itu kita berusaha menyusun rencana pembangunan dalam Repelita VII. Dalam melaksanakannya terlebih dahulu harus kita kenali tantangan-tantangan yang kita hadapi, baik yang berasal dari luar atau dari dalam serta dapat bersumber pada faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Dengan terjadinya integrasi ekonomi, volume perdagangan dunia akan meningkat lebih cepat. Tantangan utama dengan terjadinya proses globalisasi tersebut adalah mengupayakan agar bangsa Indonesia diuntungkan oleh proses perubahan itu. Kuncinya dari segi ekonomi adalah membangun daya saing dan memeliharanya agar berkesinambungan.

Meningkatkan daya saing akan sangat tergantung pada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dalam peningkatan efisiensi kita berbicara mengenai penyempurnaan kelembagaan ekonomi secara keseluruhan. Deregulasi dan debirokratisasi adalah sebagian dari upaya itu. Sedangkan peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan teknologi.

Pembangunan sumber daya manusia telah banyak kita lakukan dan telah cukup besar hasilnya seperti yang antara lain terlihat dari indikator keberhasilan pembangunan di bidang

pendidikan dan kesehatan. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara di sekeliling, kita masih jauh tertinggal. Oleh karena itu, mengejar keteringgalan kualitas sumber daya manusia merupakan pula tantangan bagi kita.¹ Dalam hal ini, kita menghadapi masalah yang tidak ringan. Berdasarkan survei penduduk antar sensus (SUPAS) 1985 dan 1995 tampak bahwa jumlah angkatan kerja pada tiap-tiap tingkat pendidikan memang meningkat. Tetapi angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah masih sekitar 70 persen.²

Selain itu, pengangguran dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas sejak tahun 1985 selalu meningkat.³ Untuk mengatasi masalah ini maka di masa depan kegiatan formal harus ditingkatkan, karena adanya kecenderungan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka ia akan lebih memilih bekerja pada kegiatan formal. Tantangan penciptaan lapangan kerja sektor formal ini akan makin besar di masa yang akan datang.⁴

Membangun kemampuan teknologi, merupakan tantangan yang tidak ringan. Penguasaan teknologi pada tingkat perusahaan, dengan begitu juga pada tingkat industri, masih sangat lemah. Kemampuan kita dalam investasi (*investment capability*), produksi (*production capability*), penyesuaian rekayasa dan rancang bangun (*engineering adjustment*), organisasi (*organizational capability*), pemasaran (*marketing capability*) masih perlu ditingkatkan. Apalagi untuk menciptakan pengetahuan dan teknologi baru (*major change capability*). Kelemahan ini berakar dari kemampuan teknologi nasional (prasarana, sarana, dan SDM teknologi) kita yang masih lemah maupun pada kelembagaannya, termasuk dalam kaitannya dengan dukungannya kepada dunia usaha.

Sektor ekonomi Indonesia yang makin modern dan sudah cukup berkembang telah memiliki pelaku-pelaku ekonomi yang tangguh dan mempunyai peluang untuk berkompetisi. Yang terutama menjadi masalah bagi kita ialah apakah ekonomi rakyat yang kita artikan sebagai ekonomi usaha kecil dapat terlibat di dalamnya dan turut mengambil manfaatnya. Dalam kondisi seperti sekarang ini jelas lapisan terbesar rakyat Indonesia ini tidak akan dapat mengikuti, apalagi memanfaatkan perkembangan ekonomi yang demikian.

Betapapun majunya negara kita, kalau yang maju hanya satu bagian kecil saja, sedangkan lapisan terbesarnya makin jauh tertinggal, ancaman terhadap persatuan dan kesatuan justru akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan pada saat kita semua sama-sama serba kekurangan. Oleh karena itu, membangun ekonomi usaha kecil, menghilangkan kemiskinan, dan mendorong kemajuan wilayah-wilayah yang tertinggal adalah tantangan yang mendasar dalam konsep pembangunan Indonesia.

Selain itu, kegiatan usaha di Indonesia sebagian besar masih didominasi oleh pengusaha besar yang jumlahnya sedikit dengan aset yang besar, sedangkan pengusaha kecil yang jumlahnya sangat besar hanya memiliki aset dalam jumlah yang kecil. Di lain pihak, lapisan pengusaha

1 Kecuali untuk yang berpendidikan tidak tamat SD dan tidak pernah sekolah.

2 Berdasarkan SUPAS 1985 dan 1995, persentase angkatan kerja yang belum pernah sekolah dan tidak tamat SD menurun pada periode 1985-1995 masing-masing dari 21,71 persen menjadi 12,09 persen dan 34,41 persen menjadi 24,49 persen. Dalam periode yang sama, angkatan kerja yang berpendidikan SD meningkat dari 27,59 persen menjadi 33,37 persen.

3 SUPAS 1985 dan 1995 menunjukkan bahwa pada tahun 1985, tingkat pengangguran berpendidikan SLTA sebanyak 7,6 persen meningkat menjadi 12,36 persen dalam tahun 1995. Tingkat pengangguran berpendidikan Diploma dan Akademi meningkat dari 3,9 persen menjadi 10,9 persen. Sedangkan tingkat pengangguran yang berpendidikan Universitas meningkat dari 3,2 persen menjadi 13,5 persen.

4 Menurut statusnya, tenaga kerja yang berusaha dengan dibantu oleh karyawan/pekerja tetap dan yang bekerja sebagai karyawan/pekerja dengan upah dan gaji digolongkan sebagai tenaga kerja di sektor formal. Sedangkan tenaga kerja yang berusaha sendiri, dibantu pekerja keluarga dan atau karyawan/pekerja tetap, serta pekerja keluarga digolongkan sebagai tenaga kerja di sektor informal.

menengah belum berkembang secara sehat dan mantap.⁵ Struktur dunia usaha yang demikian tidak kukuh, selain juga tidak mencerminkan cita-cita demokrasi ekonomi seperti yang diamanatkan oleh konstitusi. Dalam rangka itu, kemitraan perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan agar menjadi pola dalam kehidupan ekonomi kita. Upaya itu merupakan tantangan yang tidak mudah, tetapi mutlak harus dilakukan.

Kita menyadari bahwa pembangunan tidak mungkin berjalan lancar apabila keadaan negara senantiasa kacau. Kita ketahui pula bahwa suasana aman, tenteram, stabil tetapi dinamis tidak datang dengan sendirinya dan tidak dapat pula terjamin akan tetap terpelihara, namun harus diciptakan melalui kerja keras dan upaya yang berkesinambungan. Kita bisaantisipasi bahwa dalam Repelita VII, suasana kehidupan politik nasional akan makin diwarnai oleh keinginan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, partisipasi kearah perbaikan dan pembaharuan, serta kesadaran akan kemajemukan. Dengan demikian menjaga stabilitas nasional merupakan pekerjaan yang rumit dan memerlukan pendekatan-pendekatan yang canggih, sehingga ini merupakan pula tantangan kita di masa yang akan datang.

Salah satu masalah yang menjadi kendala dalam upaya pembangunan kita adalah kelemahan dalam birokrasi. Demikian pula dirasakan kelemahan di bidang hukum. Tanpa perbaikan yang nyata pada kedua bidang ini, pembangunan sulit untuk bisa berjalan optimal. Hal ini merupakan tantangan yang tidak ringan pula.

Sejalan dengan arus informasi yang mengalir makin cepat, interaksi kebudayaan kita dengan kebudayaan luar juga akan makin gencar. Interaksi itu dapat membuahkan hasil yang positif dengan memperkaya kebudayaan bangsa dan mendorong proses modernisasi. Interaksi itu juga akan menjadi pemacu pembaharuan dan merangsang pemikiran yang lebih maju, termasuk melahirkan teknologi baru. Sebaliknya interaksi itu, dapat juga membawa dampak yang negatif bahkan bisa mengguncang masyarakat kita. Membentengi diri masyarakat dan bangsa kita, tampaknya sudah tidak bisa dilakukan lagi dengan mendirikan tembok penghalang, tetapi dengan penguatan ketahanan kebudayaan kita sendiri. Oleh karena itu, kita ditantang untuk dapat membuat ekonomi, teknologi, dan pengetahuan menjadi perangkat budaya yang berwawasan kebangsaan.

III. Gambaran Masyarakat Indonesia pada Repelita VII

Dengan mengenali berbagai tantangan itu, dan berbekal modal hasil-hasil pembangunan yang telah kita capai selama ini kita merancang upaya pembangunan dalam Repelita VII.

Dalam Repelita VII, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan cukup tinggi yaitu rata-rata di atas 7 persen per tahun. Sementara itu laju pertumbuhan penduduk kita harapkan akan terus turun hingga mencapai 1,4 persen per tahun menjelang akhir Repelita VII.⁶ Jika kedua sasaran tersebut dapat dicapai maka pendapatan per kapita Indonesia tahun 2003 diharapkan akan meningkat menjadi hampir 1,8 kalilipat dibanding dengan tahun 1993, atau menjadi sekitar US\$1.400 berdasarkan harga konstan US\$ 1993 atau sekitar US\$2.000 pada harga yang berlaku. Dengan sasaran itu, kita akan memantapkan diri berada di kelas pendapatan menengah menurut klasifikasi Bank Dunia.

Berbagai proses transformasi akan menyertai pertumbuhan ekonomi tersebut. Transformasi struktur produksi akan tercermin pada peran sektor pertanian yang akan terus turun, tetapi harus kita upayakan tidak terlalu cepat. Peran sektor industri pengolahan, yang dewasa ini

5 Berdasarkan data BPS, dalam tahun 1993 jumlah industri kecil yaitu dengan jumlah tenaga kerja di bawah 20 orang sebanyak 2,5 juta pengusaha atau 99,27 persen dengan nilai tambah bruto sekitar Rp4,0 triliun atau 7,48 persen. Sedangkan industri besar dan sedang berjumlah 18,2 ribu pengusaha atau 0,73 persen dengan nilai tambah bruto sebesar Rp49,8 triliun atau 92,52 persen dari total nilai tambah bruto.

6 Pada akhir PJP I 1,67 persen dan pada akhir Repelita VI diperkirakan 1,51 persen.

sudah melebihi 25 persen, akan terus meningkat. Dengan besaran-besaran yang demikian pada waktu itu Indonesia sudah tergolong negara industri baru. Seperti halnya dengan sektor industri pengolahan, peran sektor jasa juga akan mengalami peningkatan.

Sektor pertanian kita upayakan untuk dapat tumbuh rata-rata di atas 3 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut utamanya berasal dari produk yang permintaannya naik dengan cepat, baik untuk konsumsi dalam negeri, maupun diproses lebih lanjut oleh industri pengolahan dalam negeri untuk kemudian diekspor. Sektor industri diharapkan dapat tumbuh rata-rata di atas 10 persen per tahun. Pada sektor industri ini juga akan terjadi perubahan komposisi, dari industri ringan⁷ menjadi makin banyak ke industri berat.⁸

Proses transformasi juga akan terjadi dalam struktur permintaan domestik. Sumbangan pengeluaran konsumsi rumah tangga akan makin menurun, sementara itu hasrat menabung makin meningkat, dengan makin tingginya pendapatan per kapita. Sejalan dengan makin menurunnya persentase konsumsi masyarakat, maka persentase pengeluaran investasi akan meningkat. Peningkatan investasi ini yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam Repelita VII. Hal ini juga menunjukkan peningkatan kemandirian pembangunan bangsa kita.

Dengan makin baiknya daya dukung ekonomi, maka kita mengharapkan terjadinya perbaikan dalam perdagangan internasional. Kemampuan ekspor akan makin membaik dengan makin kuatnya daya saing produk kita. Di lain pihak, impor barang-barang konsumsi akan terus kita tekan karena kemampuan produksi dalam negeri yang meningkat. Dengan demikian, keseimbangan neraca pembayaran akan dapat dijaga dalam batas-batas yang aman.

Dengan struktur perekonomian demikian, daya tahan ekonomi Indonesia akan makin kuat. Stabilitas ekonomi akan makin mantap seiring dengan kebijaksanaan ekonomi makro yang berhati-hati. Kemandirian ekonomi juga akan makin diperkuat dengan terus membatasi ketergantungan terhadap sumber dana pembangunan dari luar yang akan makin terbatas. Kita akan terus menggali sumber-sumber pendapatan dalam negeri yang potensinya masih sangat besar.

Di samping itu, kemajuan ekonomi juga diperkuat oleh proses akumulasi atau peningkatan kapasitas produksi nasional yang akan tercermin dalam peningkatan investasi sumber daya manusia dan investasi secara fisik yang tercermin melalui *capital deepening*.⁹

Dari sudut ketenagakerjaan, makin banyak tenaga kerja kita yang akan bekerja di luar sektor pertanian. Sektor industri akan makin diandalkan sebagai penyerap tenaga kerja dan secara bertahap nantinya akan menggantikan peran sektor pertanian. Ini bukan berarti bahwa sektor pertanian menjadi sektor yang tidak penting. Sektor ini masih tetap akan menyerap tenaga kerja yang paling besar. Pada akhir Repelita VII, tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian masih akan sebesar 39 persen.¹⁰

Tenaga kerja kita, sejalan dengan peningkatan kualitasnya, akan berkembang ke arah tenaga kerja *white collar*, dari tenaga kerja yang pada saat ini sebagian besar terdiri dari *blue collar*. Selain itu, tenaga kerja kita juga akan lebih banyak bergerak di kegiatan formal yang lebih produktif dibandingkan di kegiatan informal, yang saat ini jumlahnya diperkirakan lebih dari 36 juta.

Unsur yang teramat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia ini selain kesempatan kerja adalah pendidikan, dan kesehatan. Di bidang pendidikan, pada Repelita VII program wajib belajar 9 tahun akan makin mantap. Pendidikan terendah rata-rata penduduk Indonesia akan mengarah pada tingkatan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Angka

7 Makanan dan minuman, tekstil, dan sebagainya.

8 Logam dasar besi dan baja, mesin, dan sebagainya.

9 *Capital deepening* adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas barang modal per pekerja di berbagai lapangan pekerjaan.

10 Pada akhir PJP I 48,2 persen dan pada akhir Repelita VI diperkirakan 44,0 persen.

partisipasi pendidikan SLTP pada akhir Repelita VII diharapkan telah mencapai 87 persen.¹¹ Sementara itu, angka partisipasi pendidikan SLTA pada akhir Repelita VII akan mencapai lebih dari 50 persen.¹² Dengan pendidikan yang makin tinggi tersebut, kualitas tenaga kerja akan makin baik. Sementara itu, sasaran di bidang kesehatan adalah meningkatnya pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat sehingga dapat menaikkan usia harapan hidup menjadi 66,3 tahun pada akhir Repelita VII.¹³ Dengan gambaran yang demikian transformasi demografi terus berlanjut.

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di luar sektor pertanian akan meningkatkan jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Bank Dunia memperkirakan pada tahun 2000 penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan akan mencapai 44 persen. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan prasarana fisik dan sosial perkotaan yang memadai agar dampak negatif urbanisasi di perkotaan dapat kita elakkan.

Selain sumber daya manusia, proses pertumbuhan ekonomi juga harus didukung oleh prasarana dan sarana penunjang yang memadai. Untuk itu, pembangunan listrik, jalan, telepon, air, dan pelabuhan akan dipacu dengan melibatkan swasta terutama di daerah-daerah dan dalam bidang-bidang yang kelayakan ekonominya memungkinkan. Dengan demikian investasi pemerintah di bidang ini akan diarahkan untuk wilayah-wilayah atau kawasan-kawasan yang tertinggal dan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat miskin.

Pembangunan nasional tidak saja mengejar pertumbuhan namun juga ditujukan untuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Proses transformasi ketenagakerjaan seperti diuraikan di atas, pada gilirannya akan mendorong terbentuknya lapisan menengah yang makin kuat dan akan menjadi tulang punggung perekonomian yang handal. Menguatnya lapisan menengah ini berarti memperbaiki distribusi pendapatan. Lapisan usaha menengah yang makin kuat itu akan saling mendukung dengan lapisan usaha kecil yang bertambah baik, dan dengan usaha besar yang diharapkan juga makin luas basisnya. Keadaan ini diharapkan dapat terwujud dengan makin mudahnya akses ke lembaga-lembaga pembiayaan, utamanya bagi usaha menengah dan kecil termasuk koperasi.

Masalah kemiskinan absolut yang sampai saat ini masih merupakan pekerjaan rumah yang besar, diharapkan sebagian besar sudah dapat teratasi pada akhir Repelita VII. Di samping itu, kawasan terbelakang dan terpencil akan memperoleh perhatian khusus agar dapat melepaskan diri dari perangkap keterbelakangan dan dapat turut maju sebagaimana kawasan lainnya yang telah lebih dahulu berkembang. Untuk itu, perhatian lebih besar akan diberikan pada investasi selain prasarana juga sumber daya manusia bagi daerah-daerah tersebut.

Salah satu tolok ukur keadilan adalah apabila kemajuan, kemandirian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tercapai secara merata di daerah. Konsep keadilan ini sesungguhnya selaras dengan proses transformasi perekonomian itu sendiri, karena yang saya uraikan tadi adalah bukan hanya transformasi secara nasional tetapi sesungguhnya juga terjadi di daerah-daerah.

Perlu saya kemukakan di sini, bahwa dalam proses transformasi tidak berarti bahwa semua daerah menjadi daerah industri. Sektor pertanian, tetap memegang peranan yang penting sebagai penyangga kebutuhan bahan pangan pokok dan sekaligus mendukung perkembangan agroindustri. Juga jasa pariwisata, mempunyai arti penting dalam mendatangkan devisa. Pada akhir Repelita VII pariwisata akan menghasilkan devisa US\$15 miliar dan sudah akan menjadi

11 Pada akhir PJP I 52,7 persen dan pada akhir Repelita VI diperkirakan 66,2 persen.

12 Pada akhir PJP I 33,2 persen dan pada akhir Repelita VI diperkirakan 40,5 persen.

13 Pada akhir PJP I 62,7 tahun dan pada akhir Repelita VI diperkirakan 64,6 tahun.

penghasil devisa terbesar.¹⁴

Keberhasilan pembangunan memang tidak cukup hanya diukur di bidang sosial ekonomi saja tapi juga akan tercermin di dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan tetap menjaga keutuhan Pancasila dan UUD 1945, kehidupan berbangsa dan bernegara diupayakan makin serasi dengan kesadaran yang meningkat terhadap wawasan nusantara. Dengan kesadaran ini, ketahanan nasional akan makin kokoh menghadapi gelombang tantangan-tantangan yang tidak makin kecil di masa depan.

Meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara tersebut kita harapkan akan sejalan dengan meningkatnya kualitas dan mekanisme kehidupan politik berdasarkan konstitusi. Kehidupan yang makin transparan diharapkan tidak saja terlihat dalam bidang ekonomi namun juga dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

Kesemuanya itu merupakan faktor penentu terciptanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Peran ABRI sendiri sebagai stabilisator dan dinamisator serta pengayom masyarakat bukannya makin mengendur, tetapi akan makin dibutuhkan. Rasa aman dalam kehidupan masyarakat dan dalam kegiatan pembangunan nasional harus senantiasa terjaga. Dengan kualitas sumber daya yang makin tinggi, ABRI diharapkan menjadi suri tauladan dalam mengamalkan nilai-nilai pokok dalam kehidupan bangsa dan dalam peningkatan disiplin nasional. Disiplin sangat dibutuhkan agar daya tahan nasional, termasuk daya tahan dan daya saing ekonomi akan makin kuat menghadapi perubahan-perubahan besar yang sedang berlangsung.

Saya tidak akan memperpanjang lagi uraian mengenai wujud bangsa kita yang kita harapkan dihasilkan oleh pembangunan dalam Repelita VII. Untuk pembahasan hari ini, saya rasa cukup beberapa hal pokok yang sudah saya sampaikan tadi.

IV. Penutup

Menapaki tahap pembangunan nasional berikutnya kita perlu menghimpun sebanyak-banyaknya modal pembangunan yang kita miliki, yakni hasil-hasil pembangunan yang telah kita capai serta mengenali berbagai tantangan yang kita hadapi. Berbekal modal dan pengenalan tantangan ini kita mengembangkan potensi yang kita miliki dan memanfaatkan setiap peluang. Atas dasar itu, rencana pembangunan nasional disusun untuk kemudian kita laksanakan dan kita wujudkan.

Perlu saya ingatkan lagi bahwa saat ini kita tengah mempersiapkan penyusunan Repelita VII, dan apa yang saya uraikan tadi belumlah merupakan gambaran yang lengkap. Hasil akhir dari penyusunan ini baru akan terwujud setelah GBHN 1998 tersusun. Namun, gambaran awal ini saya sampaikan untuk kita cermati bersama, untuk kita renungkan apakah sudah menuju ke arah yang seharusnya dan mendekatkan kita kepada amanat pendirian Republik ini.

14 Pada akhir Repelita VII kunjungan wisatawan mancanegara sudah akan di atas 10 juta, dibandingkan dengan 3,4 juta pada akhir PJP I dan 6,5 juta yang diperkirakan pada akhir Repelita VI. Jumlah devisa dari sektor ini pada akhir PJP I adalah US\$ 3,9 miliar dan pada akhir Repelita VI kurang lebih US\$9 miliar.